

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
KELUARGA SANGAT MISKIN
(STUDI DI UPPKH KECAMATAN KOTA SUMENEP)**

**Enza Resdiana
enza.resdiana@gmail.com
Dosen Fisip Universitas Wiraraja Sumenep**

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan yang dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Beberapa pihak yang terlibat dalam program ini antara lain adalah pihak pemberi layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengubah perilaku peserta PKH dalam bidang pendidikan di Indonesia terutama yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep) .

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan dalam fokus penelitian menggunakan teori George Edward III, yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber-Sumber (*Resources*), Sikap (*Dispotition/Attitude*), Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep karena di kecamatan ini program PKH pertama 2007 diluncurkan.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya pendamping sebagai pelaksana lapangan dan ujung tombak terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep sangat maksimal dan baik dalam hal komunikasi (*comunication*) ini dapat dilihat dari pemahaman peserta PKH dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan pada Implementasi yang berkaitan dengan sumber-sumber (*resource*) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) juga dirasa cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rutinitas pertemuan kelompok-kelompok KSM dan penyaluran PKH yang tepat pada waktunya. Sedangkan dalam sikap (*attitude*) secara umum baik akan tetapi ada kekurangan dalam Implementasi yang berkaitan dengan sikap, hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah penerima atau peserta PKH dibandingkan dengan jumlah keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat kepesertaan PKH atau banyak dari KSM yang lain yang sudah memenuhi syarat tidak mendapat bantuan tunai bersyarat tersebut. Sedangkan fokus yang terakhir adalah struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dimana dalam Implementasiya dirasa cukup baik, dikarenakan minimnya kesalahan dalam koordinasi pada setiap lembaga yang terkait dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Sumenep.

Kata Kunci : *Implementasi, ProgramKeluargaHarapan (PKH), Pendidikan.*

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Salah satu faktor yang mendukung kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri bagi setiap individu agar dapat hidup dan me-langsungkan kehidupan, oleh sebab itu menjadi seorang yang terdidik sangatlah penting. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur maju atau tidaknya dengan cara mengukur tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat bangsa tersebut, sebab pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila *output* dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dasar seperti sandang, pangan dan papan. Namun, sangat memprihatinkan rasanya melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Berbagai masalah yang timbul, mulai dari ketersediaan sarana yang tidak memadai, serta meningkatnya anak putus sekolah.

Bila dicermati terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya pendidikan yang berlaku di Indonesia dan salah satu dari faktor tersebut adalah, faktor biaya : biaya pendidikan yang cukup mahal menambah buramnya kualitas pendidikan kita. Di era sekarang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas baik, harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat yang kurang mampu menyekolahkan anaknya di

sekolah yang kualitas pendidikannya baik terpaksa hanya menda-patkan sekolah yang terbatas sarana dan prasarananya. Di daerah-daerah banyak sekolah yang kurang berfungsi dengan baik, diantaranya kerusakan bangunan, sarana terbatas, namun dengan kondisi tersebut mereka tidak putus semangat untuk tetap terus belajar walaupun dengan fasilitas seadanya. Tidak dipung-kiri bahwa setiap tahunnya pendidikan terus mengalami peningkatan biaya, sehingga mengaki-batkan banyak diantara mereka yang putus sekolah, atau bahkan tidak sekolah karena terhalang masalah biaya. Setelah menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan penancangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal Pemerintah telah men-canangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung. Pada awal penancangan wajib belajar tersebut, Program Wajib Belajar 6 Tahun telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia

Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Peme-rintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Usaha pemerintah untuk mendukung PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut serta pemerintah sebagai bagian dari pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu atau keluarga sangat miskin (KSM), maka pemerintah berdasar Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mencanangkan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk menjamin kesejahteraan sosial yang menyeluruh maka negara mengembangkan Sistem Jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta, Inpres nomor 3 Tahun 2010, tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Implementasi program bantuan terhadap masyarakat.

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global tentu saja harus mampu mewujudkan tujuan pembangunan dengan cara : pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, meningkatkan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, kesetaraan gender, pena-

nggulangan angka kematian bayi dan balita, dan penurunan angka kematian ibu melahirkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dimana bantuan yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) dengan persyaratan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran KSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan PKH diharapkan KSM penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin sehingga mereka mampu berfungsi secara sosial yang pada akhirnya rantai kemiskinan dapat diputus.

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat, khususnya bagi KSM yang diwajibkan memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku

KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Kelak diharapkan perubahan perilaku tersebut akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah KSM yang bekerja dan sekaligus akan menjadi tantangan utama bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimana-pun mereka berada.

Sedangkan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan bantuan tunai bersyarat pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi anak-anak KSM, serta untuk mengurangi angka pekerja anak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, Program Keluarga Harapan (PKH) berupaya memotivasi KSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Secara umum, Program Keluarga Harapan ini juga mempunyai manfaat, diantaranya : Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. Pada jangka pendek memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, untuk jangka panjang dapat memutuskan anak miskin antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan

anak di masa depan (*price effect*) bagi anak keluarga miskin dan memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya (*insurance effect*), mengurangi pekerjaan anak, mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender).

Meski demikian Program Keluarga Harapan (PKH) ini akan menjadi sia-sia apabila dalam Implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Melihat pada realisasi daerah lain yang dinilai masih kurang, dimana banyak rumah tangga yang layak menerima bantuan, namun karena pendataan yang tidak akurat warga masyarakat tidak terakomodir sebagai penerima PKH. Selain itu, bantuan tunai bersyarat dari PKH terkadang digunakan KSM untuk keperluan rumah tangga, bukan pendidikan atau kesehatan sehingga tujuan dasar dari penetapan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat sepenuhnya terealisasi.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep) .

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep) .”

C. KAJIAN TEORI

Kebijakan

Menurut Charles O. Jones (1991: 46), kata kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patikan, dan maksud besar tertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Friedrich dalam Wahab (1991:13) mengatakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Inti kebijakan adalah merupakan suatu ketetapan yang bertujuan untuk di laksanakan oleh pemberi kebijakan maupun yang men-taati kebijakan tersebut (objek kebijakan).

Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107) dalam Pasolong (2008:38), mengatakan bahwa Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano ber-anggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Thomas Dye (1981) dalam Pasolong (2008:39), mengatakan bahwa Kebijakan Publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Menurut Parker (1975:144), Kebijakan Publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Dalam menentukan suatu kebijakan/ sebelum penetapan suatu kebijakan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di lakukan oleh penentu kebijakan agar nantinya kebijakan yang di ambil sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, atau menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada.

Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Ada banyak sekali teori tentang Tahapan-tahapan dalam penentuan kebijakan, karena memang kebijakan publik ada untuk memenuhi kepentingan masyarakat, serta kebijakan yang di ambil dapat bermanfaat khususnya bagi negara dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Dunn adalah 1) Penyusunan Agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan, 4) Penilaian/ Evaluasi Kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting

dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan Implementasi dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pembuat keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku, implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*).

Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Model pendekatan implementasi kebijakan publik adalah, bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan implementasi sesuai dengan prosedur dan sesuai

tujuan yang ingin dicapai. Di bawah ini adalah beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik

1. Implementasi Sistem Rasional (*Top-Down*). Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau: "Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia".

Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Menurut Edward III (1980:1) dalam Nugroho (2009), ditegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakan, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu sebagai berikut:

1. *Communication* (Komunikasi): sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.
2. *Resources* (Sumber-Sumber): sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan

penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :

- a) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
 - b) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi
 - c) dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
 - d) wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
3. *Disposition atau Attitude* (sikap) : berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
4. *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi) ; suatu kebijakan sering-kali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.
2. Implementasi Kebijakan *Bottom Up*

Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi

adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus*. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Secaragarisbesar model-model pendekatan implementasi kebijakan publik yang ada bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan yang di ambilserta memaksimalkan realisasi dengansebaik mungkin sehingga Implementasi dari kebijakan tersebut patsasaran dan terarah pada tujuandasar di keluarkannya kebijakan publik. Dimanatujuan yang utamadalam pengambilan kebijakan adalah untuk memajukan negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan

Kesejahteraan bagi masyarakat adalah merupakan kebutuhan bagi setiap negara, karena kesejahteraan merupakan salah satu tolak ukur bagi

setiap negara dalam menunjang kemajuan negara tersebut.

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Sedangkan menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kesejahteraan (*welfare*) secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung (Suharto, 2005b).

Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar yang adapada manusia. Seperti tempat tinggal, makanan. Akan tetapi kesejahteraan sebenarnya sangat sulit diukur karena kesejahteraan dapat dirasakan di nikmati oleh setiap individu sendiri, jadi standar kesejahteraan setiap individu berbeda – beda. Kadang orang yang kita anggap memiliki materi/ harta yang banyak tetapi merasa tidak sejahtera, hal ini yang membuat kita mengukur kesejahteraan sangat sulit untuk kita ketahui. Akan tetapi ada beberapa ahli menilai kesejahteraan

cara umum dapat diukur dan dapat diketahui.

Ukuran Kesejahteraan

Amartya Sen dalam bukunya “*Inequality Reexamined*” (1992) menegaskan, bahwa kesejahteraan (*well-being*) tidak cukup diukur dari indikator agregat makroekonomi semisal GDP, GNP atau Real Incomes. Tidak pula memadai jika kesejahteraan hanya diukur dari kecukupan bahan pokok (*primary goods*) ataupun sumberdaya (air, energi, dan lain-lain). Negara yang memiliki tingkat GDP yang tinggi, seringkali masih menghadapi masalah kemiskinan dan kesenjangan akut di perekonomian domestiknya. Dua orang individu yang memiliki sumberdaya yang sama seringkali mencapai kemakmuran (*wealth*) yang berbeda.

Bagi Sen, *primary goods* dan *resources* baru merupakan “bahan dasar” yang masih perlu ditransformasi menjadi hal-hal yang memang menjadi karakteristik dari kesejahteraan. Dalam terminologi Sen, karakteristik kesejahteraan adalah tercapainya “*functioning*” (fungsi). Dan untuk mencapai *functioning* tersebut, individu perlu memiliki *capability* atau kemampuan untuk mentransformasikan bahan dasar yang dimilikinya menjadi kesejahteraan.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- a. Tingkat pendapatan keluarga;
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
- c. Tingkat pendidikan keluarga;

- d. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

D. METODE PENELITIAN

Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Komunikasi (*Communication*) : Sosialisasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga sangat miskin (KSM), khususnya penerima bantuan tunai bersyarat pendidikan.
2. Sumber-Sumber (*Resources*) : Faktor-faktor pendukung yang terlibat dalam Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Sikap (*Disposition/Attitude*) : Inisiatif / strategi yang dilakukan oleh pelaksana/implementor Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan bantuan tunai bersyarat pendidikan terhadap KSM.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) : Organisasi-organisasi yang terlibat dalam Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kota Sumenep dengan alasan memilih lokasi penelitian di beberapa desa di Kecamatan Kota Sumenep antara lain desa Kebunan, Bangselok, Kebonagung, dan Pandian. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kota Sumenep merupakan pelaksana Program Keluarga Harapan serta

kecamatan yang maju di bandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Sumenep dan mempunyai jumlah penduduk paling banyak. Akan tetapi, sebagian masyarakatnya masih memiliki pendidikan yang rendah.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan mengajukan pertanyaan terbuka (wawancara) dengan sumbernya yaitu pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kota Sumenep, Ketua UPPKH Kabupaten Sumenep, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, serta masyarakat sebagai penerima bantuan tunai bersyarat pendidikan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep atau data yang ada relevansinya dengan penelitian.

Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dari penelitian ini maka peneliti membutuhkan alat atau instrument agar penelitian ini bisa terwujud. berikut ini adalah beberapa instrument yang digunakan :

- a. Pedoman wawancara : instrumen yang digunakan pada penelitian

ini menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka, dimana peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Pedoman observasi : pedoman observasi yang digunakan pada penelitian ini dalam bentuk ceklis, untuk melihat kesesuaian antara pernyataan informan dengan kenyataan yang sebenarnya.
- c. Dokumentasi : selain pedoman wawancara dan observasi, peneliti juga melihat dokumen atau arsip, serta foto atau video kegiatan yang dilakukan.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Ketua UPPKH Kabupaten Sumenep, pendamping PKH di Kecamatan Kota Sumenep dan penerima bantuan tunai bersyarat PKH dalam bidang pendidikan di desa Kebunagung, Pandian, Bangselok, dan Kebunan.

b. Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi sampel sebagai informan adalah :

1. Informan kunci adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.
2. Informan utama adalah Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 2 orang dan Ketua UPPKH Kabupaten Sumenep.
3. Informan tambahan adalah masyarakat yang menerima bantuan tunai bersyarat pendidikan dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kota Sumenep, khususnya yang ada di desa Kebunagung,

Pandian, Bangselok, dan Kebunan. Informan yang diambil di setiap desa masing-masing 2 orang, jadi jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 informan.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendapat di atas, maka teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat (Djam'an, 2009 : 104), dengan cara inilah peneliti dapat mempercayai apa yang sesungguhnya terjadi, karena peneliti melihat dengan mata kepala sendiri.

2. Wawancara

Wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi (Djam'an, 2009 : 129). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dengan cara berbaur dan mengambil bagian aktif dalam situasi sosial penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia, dokumen dapat diartikan catatan kejadian yang sudah lampau (Djam'an, 2009 : 146). Dokumen ini bisa berupa hasil dari Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Sumenep, dan dokumen lain yang mendukung.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman 1984, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

E. PEMBAHASAN

Dalam Implementasi suatu kebijakan dalam suatu organisasi, entah itu merupakan organisasi pemerintah atau organisasi lain. Tentunya harus melakukan kajian mendalam agar dalam Implementasinya sesuai dengan apa yang diinginkan.

George Edward III (1980) dalam Youso (2007), mengusulkan 4 (empat) *variable* yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resourcess* (Sumber-Sumber)
3. *Dispotition* atau *Attitude* (sikap)
4. *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi)

Berdasarkan pendapat George Edward III (1980) dalam Youso (2007) di atas, telah memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan dengan baik maka harus melakukan 4 hal dalam Implementasinya seperti halnya yang dikemukakan di atas. Maka dari itu, peneliti menggunakan teori George Edward III untuk penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas

Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UP-PKH Kecamatan Kota Sumenep) .

1. Komunikasi

Banyak Orang beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan Implementasi dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku, implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) mendefinisikan Implementasi Kebijakan adalah Implementasi keputusan kebijaksanaan dasar, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Untuk mencapai tujuan dalam proses implementasi suatu kebijakan, tentunya dibutuhkan individu yang mempunyai kompetensi dalam berkomunikasi komunikasi dengan baik. Sehingga nantinya pekerjaan dapat terse-

lesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana program keluarga harapan di kecamatan kota Kabupaten Sumenep mencakup beberapa faktor penting yaitu transformasi pemahaman dalam sosialisasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan dari pendamping kepada peserta PKH dimana Transformasi pemahaman ini sudah berjalan dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pendamping terhadap peserta PKH dirasa kurang sesuai. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya miskomunikasi dan aliran informasi pada berbagai pelaksana di tingkat kecamatan khususnya pada peserta PKH dimana Peserta PKH kurang melakukan komunikasi dengan pendamping meski pendamping melakukan pertemuan rutin sebulan sekali dimana pertemuan ini ditetapkan dan disepakati oleh penerima bantuan tunai bersyarat bantuan PKH. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam buku panduan serta tujuan dari Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan. Sehingga ini akan menambah tingkat kesalahan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan terlaksananya program keluarga harapan di kecamatan kota.

2. Sumber- Sumber

Dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan tentunya tidak hanya bersandar pada bagaimana berkomunikasi dengan baik, akan tetapi dalam Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Dalam hal ini semua, elemen yang berkaitan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan tentunya harus memiliki sarana dan prasarana yang dapat

digunakan untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Timtuss (1974), Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senan-tiasa berorientasi pada tindakan dan berorientasi pada masalah. Dengan demikian kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Untuk melaksanakan Program Kebijakan tentunya harus mempunyai sasaran yang jelas serta bahan yang ingin disampaikan sehingga dalam proses Implementasi tidak menemui kendala, hal ini juga dilakukan oleh pelaksana Program Keluarga Harapan di tingkat kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, dimana pendamping dalam Implementasi menjadi garda terdepan dari setiap Implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Peserta PKH. Dimana kemudian pendamping menyiapkan bahan yang akan disampaikan pada peserta PKH. Sedangkan peserta PKH dituntut aktif dalam Implementasi atau kegiatan rutin yang dilakukan dalam mendukung proses terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep ini.

3. Sikap

Sedangkan dalam proses implementasi kebijakan yang ketiga yang harus dilakukan oleh pelaksana program keluarga harapan adalah sikap. Dimana sikap menurut George Edward III adalah Attitude (sikap) : berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor berse-dia untuk

mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi Implementasi program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan bantuan tunai bersyarat yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total

dalam melaksanakan kebijakan/program.

Dalam proses pelaksanaan PKH pendidikan di kecamatan Kota Kabupaten Sumenep menemui beberapa kendala seperti sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang pragmatis menjadi masyarakat yang mengerti betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan masyarakat. Sikap baik yang dilakukan oleh pelaksana PKH sangat dibutuhkan oleh peserta PKH dan masyarakat sekitar, hal ini berkaitan dengan gesekan yang terjadi di masyarakat, dimana tidak semua KSM atau KSM dapat tercover dalam PKH sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan sosial. Metode yang dilakukan oleh pendamping dalam mensukseskan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan disini selalu melakukan interaksi serta komunikasi yang baik dengan semua pihak tidak terkecuali kepala desa, KSM, tokoh masyarakat sehingga proses implementasi kebijakan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan meski dalam Implementasiya menemukan banyak kendala.

4. Struktur birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat *variable*, yaitu :

1. *Idealized policy* : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. *Target groups* : yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena ke-lompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factors* : unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Secara garis besar model-model pendekatan implementasi kebijakan publik yang ada bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan yang di ambil serta memaksimalkan realisasi dengan sebaik mungkin sehingga Implementasi dari kebijakan tersebut tepat sasaran dan terarah pada tujuan dasar dikeluar-kannya kebijakan publik. Dimana tujuan yang utama dalam pengambilan kebijakan adalah untuk memajukan negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dimana dalam Implementasi PKH ini selalu melakukan komunikasi antara pihak yang mempunyai keterkaitan. Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait baik di pusat,

provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Sehingga dalam Implementasi PKH tim yang di bentuk atau organisasi yang menjadi mitra dalam Implementasi PKH seperti BPS Sumenep yang menjadi penyedia data, PT. Pos Sumenep sebagai mitra dalam penyaluran bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan, Bidan desa sebagai penyedia layanan kesehatan dan verifikasi kesehatan, sekolah-sekolah bertanggung jawab atas penyediaan layanan pendidikan. Dinas Infokom yang bertanggung jawab terhadap Implementasi strategi komunikasi dan sosialisasi, serta Kepala desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan cara melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut, terutama dalam bidang pendidikan pendamping mendatangi sekolah dan melakukan verifikasi data fasilitas pendidikan berdasarkan data anak peserta PKH sesuai dengan data pemutakhiran. Semua pihak yang terlibat baik *service provider* maupun pendamping masing-masing melakukan tugasnya dengan baik dalam Implementasi PKH di Kecamatan Kota Sumenep.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep), yang telah melalui tahapan analisis maka dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwasanya tingkat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UPPKH Kecamatan

Kota Sumenep) yang telah dibahas sebelumnya dinilai cukup baik meskipun dalam hal implementasi selalu menemui kendala. Hal tersebut dapat dinilai dari beberapa penjelasan dari masing-masing fokus yang digunakan oleh peneliti dengan mengambil dari teori George Edward III sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting. Dikatakan demikian karena keberhasilan berinteraksi dalam organisasi adalah melalui Komunikasi. Jika komunikasi dapat berjalan secara efektif, maka informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan dan proses implementasi dalam organisasi akan berjalan lancar, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian suatu pekerjaan. Sebaliknya, bila komunikasi terhambat, arus informasi pun tersendat dan akibatnya tentu akan membuat suatu pekerjaan dan implementasi dari sebuah kebijakan akan terhambat.

Hal ini dapat dilihat dari peran peserta penerima bantuan tunai bersyarat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai peserta, serta peran masyarakat khususnya aparat desa yang senantiasa membantu dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping, akan tetapi dalam kenyataannya bahwa ada beberapa hal yang kurang dimengerti oleh peserta PKH sehingga hal ini akan menjadikan suatu tolak ukur bahwa komunikasi yang terjadi dirasa masih kurang baik dalam Implementasi Program Keluarga

Harapan di Kecamatan Kota Kabu-paten Sumenep

2. Sumber – Sumber

Pada fokus sumber-sumber dapat kita lihat bagaimanapun aku-ratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Hal ini juga disadari oleh penentu kebijakan dalam Implementasi Program keluarga harapan di kecamatan kota khususnya untuk senantiasa menggunakan sarana yang baik dalam implementasi kebijakan. Serta memberikan hak yang dimiliki oleh peserta selama peserta melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penerima bantuan tunai bersyarat bantuan. Sehingga dalam Implementasi yang berhubungan dengan sumber-sumber dirasa cukup baik.

3. Sikap

Sikap yang dimaksudkan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

Bila kita lihat dalam implementasi kebijakan yang sudah dituangkan dalam pembahasan dan analisa dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pendamping sudah sesuai dengan

yang diharapkan Implementasi Program Keluarga Harapan ini, akan tetapi dalam tingkat yang lebih global atau luas kita juga dapat melihat bahwa dalam Implementasi program ini kurang baik hal ini dikarenakan masih banyaknya Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sudah memenuhi kriteria dan syarat untuk menjadi peserta belum sepenuhnya menjadi peserta PKH.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam penerapannya, masing-masing memiliki peranan yang berbeda-beda hal ini dikarenakan setiap organisasi yang menyatu dalam Implementasi kebijakan program keluarga Harapan (PKH) di tuntut untuk selalu menjalin komunikasi dengan baik dan melakukan tugas sesuai porsi dan tanggung jawab masing-masing. Dalam melakukan tugas dan wewenang masing-masing setiap organisasi yang terlibat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Sumenep Sudah sesuai dengan tugas dan perannya hal ini dapat dilihat dari terlaksananya kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dengan baik dan wujud nyata dalam program ini adalah bahwa partisipasi peserta didik untuk hadir di sekolah lebih dari 85 % sesuai dengan syarat yang ditentukan pemerintah.

Secara garis besar dapat di simpulkan bahwa dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan tujuan program meskipun dalam penerapannya masih harus ada yang di sempurnakan agar implementasi kebijakan ini lebih

menyeluruh dan menyentuh kepada semua masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta dan peneliti berharap pemerintah menambah kuota penerima bantuan pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwanto, Erwan Agus, Ph.D dan Sulistyawati, Dyah Ratih, M.Si, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahab, Solichin Abdul, Prof.Drs, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press (Developing The Next Generation).
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Djam'an, Satori, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moelang, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutinah dan Bagong S, 2010. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cetakan Kelima, Jakarta: Media Group Kencana.
- Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012.
- Direktorat Kemitraan Komunikasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, 2012. *Sekilas PKH*, Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2013. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Kementerian Sosial RI.